



RENCANA KERJA TAHUNAN

DINAS SOSIAL

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

TAHUN 2026



Melayani dengan Hati
Menuju Masyarakat Sejahtera

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat perkenan Rahmat-Nya Dokumen **Rencana Kerja Tahunan PD Dinas Sosial tahun 2026** dapat diselesaikan. Rencana Kerja Tahunan PD pada dasarnya merupakan penterjemahan dari Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara yang ditetapkan untuk kurun waktu lima tahunan. Dokumen ini menjadi acuan dalam melaksanakan kewenangan Dinas Sosial sekaligus rujukan dalam melakukan evaluasi pelaksanaan kinerja.

Dokumen Rencana Kerja Tahunan PD oleh karenanya memiliki arti yang sangat strategis dalam perencanaan anggaran berbasis kinerja. Dokumen ini menjelaskan tentang besarnya target yang akan dicapai setiap tahun dan kurun waktu lima tahun, serta besarnya anggaran yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Kami menyadari bahwa masih terdapat kekurangan sempurnaan dalam penyusunan dokumen ini. Oleh karena itu saran perbaikan dari semua pihak yang berkompeten sangat kami hargai.

Akhirnya semoga dokumen RENCANA KERJA TAHUNAN PD ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Tenggarong, Agustus 2025



Kepala

Andriandris Suherdian

Pembina Tk. 1 (IV/b)

NIP. 19680708 199403 1 013

Daftar Isi

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	6
BAB II TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	
2.1 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Tahunan	7
2.2 Rencana Kerja Tahunan Perangkat Daerah	7
BAB III PENUTUP	23

BAB I

PENDAHULAN

1.1 Latar Belakang

Pelaksanaan Pembangunan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Kutai Kartanegara cukup menunjukkan banyak kemajuan terutama bagi warga masyarakat yang kurang beruntung dan rentan. Dalam konsep penyelenggaraan kesejahteraan sosial, warga masyarakat tersebut dikenal dengan sebutan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan masyarakat miskin yang menjadi kelompok sasaran pelayanan sosial. Untuk dapat memberikan pelayanan kepada PMKS secara komprehensif dengan mengedepankan aspek efektifitas dan efisiensi, maka diperlukan sebuah dokumen perencanaan strategis.

Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan instansi teknis di Kabupaten Kutai Kartanegara yang menyelenggarakan urusan wajib sosial, sebagai upaya mendukung tercapainya masyarakat Kutai Kartanegara yang sejahtera. Sejalan dengan tujuan tersebut, Dinas Sosial memiliki peran cukup strategis dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial. Isu penting untuk mencapai masyarakat Kutai Kartanegara yang sejahtera yang menjadi kewenangan Dinas Sosial adalah peningkatan penanganan sosial para penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).

Rencana Kerja Tahunan adalah dokumen perencanaan OPD untuk tahun 2026 disusun sebagai dasar acuan untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2026 dan selanjutnya dokumen perencanaan tersebut akan menjadi panduan dalam merencanakan kinerja tahunan yang akan disajikan dalam Rencana Kerja pada tahun berjalan. Rencana Kerja Tahunan OPD merupakan Bentuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Undang-Undang ini secara substansi mengamankan penyusunan Rencana Kerja Tahunan OPD untuk tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA), serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah. Dengan demikian terdapat keterkaitan yang sangat erat antara RPJMD, Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Pembangunan kesejahteraan sosial merupakan perwujudan dari upaya mencapai tujuan bangsa dan amanat yang dituangkan dalam UUD 1945 yang kemudian diturunkan dalam beberapa aturan perundangan dibawahnya. Landasan hukum dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang ;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita ;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan ;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat ;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika ;
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia ;
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM;
10. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000

- tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak ;
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;
 12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
 14. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional ;
 15. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
 16. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial ;
 17. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional ;
 18. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
 19. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial ;
 20. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan ;
 21. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
 22. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
 23. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin ;
 24. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas) ;
 25. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
 26. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan;

27. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat;
28. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia ;
29. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak ;
30. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern;
31. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
32. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029;
33. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
34. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
35. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan ;
36. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial ;
37. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin melalui Pendekatan Wilayah ;
38. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
39. Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang RPJMD setra tata cara perubahan RPJPD,RPJMD dan RKPD;

40. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial;
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
43. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
44. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029;
45. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Panti Sosial Asuhan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara
46. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Kutai Kartanegara ;
47. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah ;
48. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 32 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
49. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 - 2043;
50. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2024 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025

- 2043;

51. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 56 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2026 adalah :

1. Mengintegrasikan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial dalam Rencana Strategis sebagai acuan dalam merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan kebijakan dan program pembangunan di bidang kesejahteraan sosial.
2. Menyesuaikan rencana target capaian Renstra SKPD dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara.
3. Menyediakan dokumen perencanaan yang lebih operasional baik dalam pelaksanaan maupun evaluasi pencapaian target yang ditentukan.
4. Terwujudnya koordinasi dan keterpaduan sinergis dalam pelaksanaan program pembangunan kesejahteraan sosial.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Tahunan_PD

Perumusan tujuan dan sasaran jangka menengah merupakan langkah strategis dalam perencanaan pembangunan yang akan mendasari penyusunan kinerja SKPD selama lima tahun. Tujuan merupakan pernyataan tentang hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis yang dihadapi. Rumusan tujuan merefleksikan konteks pembangunan yang memiliki keterkaitan dengan visi yang ingin dicapai oleh SKPD. Pernyataan tujuan ini selanjutnya akan diterjemahkan kedalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai oleh SKPD. Hal penting yang perlu diperhatikan dalam merumuskan tujuan adalah bahwa tujuan harus realistis dan dapat dicapai.

Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2025-2029 sebagai penjabaran dari visi misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dirumuskan dalam tabel berikut ini :

Tujuan Dinas Sosial	Indikator Kinerja Tujuan	Satuan	Kondisi Awal (2024)	Target Kinerja					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
Meningkatnya Kesejahteraan Sosial yang Inklusif	Indeks Kesejahteraan Sosial	Indeks	70,29	71,91	73,53	75,15	76,76	78,38	80,00

2.2. Rencana Kerja Tahunan Perangkat Daerah

Rencana kinerja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana Strategis Perangkat Daerah Bappeda Kabupaten Kutai kartanegara. Di dalam rencana kinerja Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator

kinerja yang ada pada tingkat sasaran, program dan kegiatan. Dokumen Rencana Kinerja Tahunan ini memuat informasi tentang sasaran strategi, indikator kinerja dan target yang ingin dicapai Tahun 2024. Rencana kinerja berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber Dana yang terbatas.

Dengan Rencana kinerja program dan kegiatan yang akan dilaksanakan akan fokus dan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Rencana Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026 :

**PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN 2026
DINAS SOSIAL KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026			
		Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sasaran/ Volume	Pagu Anggaran (Rp)
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					37.118.380.499,-
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	3 Dokumen	150.000.000,-
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	6 Laporan	50.000.000,-
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	8 Laporan	100.000.000,-

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026			
		Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sasaran/ Volume	Pagu Anggaran (Rp)
4	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	1 Dokumen	50.000.000,-
5	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	1 Data	150.000.000,-
6	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu Dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	1 Berita Acara	50.000.000,-
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	120 orang/ Bulan	12.063.587.375,-
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	1 Laporan	50.000.000,-
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	12 Laporan	275.000.000,-

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026			
		Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sasaran/ Volume	Pagu Anggaran (Rp)
		Lapor Koordinasi Penyusunan Lapor Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD			
4	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	1 Dokumen	25.000.000,-
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					
1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	2 Dokumen	25.000.000,-
2	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	2 Laporan	50.000.000,-
3	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	8 Laporan	25.000.000,-
4	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	2 Laporan	100.000.000,-
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					
1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	2 Dokumen	50.000.000,-
2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	15 Orang	100.000.000,-

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026			
		Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sasaran/ Volume	Pagu Anggaran (Rp)
		Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			
Administrasi Umum Perangkat Daerah					
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	1 Paket	5.110.000,-
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Barang	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	1 Paket	59.247.000,-
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	3 Paket	100.000.000,-
4	Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Peggandaan yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Melayu	2 Paket	60.000.000,0-
5	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	3 Paket	50.000.000,-
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan,	10 Laporan	100.000.000,-
7	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	2 Dokumen	30.000.000,-
8	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	1 Dokumen	20.000.000,-

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026			
		Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sasaran/ Volume	Pagu Anggaran (Rp)
		Elektronik Pada SKPD			
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	12 Laporan	250.000.000,-
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	12 Laporan	565.315.296,-
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	2 Unit	50.000.000,-
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	3 Unit	83.950.628,-
3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	70 Unit	50.000.000,-
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	1 Unit	600.000.000,-
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL					

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026			
		Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sasaran/ Volume	Pagu Anggaran (Rp)
Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota					
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	1 Dokumen	75.000.000,-
Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota					
1	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	285 Lembaga	480.000.000,-
2	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	5 Sertifikat	50.000.000,-
3	Fasilitasi Pengembangan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesmas) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Puskesmas desa/kelurahan yang memberikan layanan sosial satu pintu dan berperan sebagai hub program Graduasi	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	237 Lembaga	4.446.000.000,-
4	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	50 Orang	944.000.000,-

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026			
		Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sasaran/ Volume	Pagu Anggaran (Rp)
		Kabupaten/Kota			
5	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	20 Orang	150.000.000,-
PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN					
Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal					
1	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/ Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Orang	25.000.000,-
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial					
1	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	355 Orang	3.575.850.000,-

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026			
		Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sasaran/ Volume	Pagu Anggaran (Rp)
		Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/ Kota			
2	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/ Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	100 Orang	287.520.000,-
3	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 Orang	400.000.000,-
4	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25 Orang	200.000.000,-
5	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/ Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 Orang	130.000.000,-
6	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 Orang	50.000.000,-

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026			
		Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sasaran/ Volume	Pagu Anggaran (Rp)
	Masyarakat	Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota			
7	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 Orang	25.000.000,-
8	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 Orang	75.000.000,-
9	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 Orang	150.000.000,-
10	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	30 Orang	75.000.000,-
11	Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional bagi Kemandirian Ekonomi Penyandang Disabilitas Miskin dan Rentan, Gelandangan dan Pengemis	Jumlah Penyandang Disabilitas Miskin dan Rentan, Gelandangan dan	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	30 Orang	150.000.000,-

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026			
		Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sasaran/ Volume	Pagu Anggaran (Rp)
		Pengemis yang mendapatkan Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional untuk Kemandirian Ekonomi			
Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial					
1	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25 Orang	50.000.000,-
2	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25 Orang	30.000.000,-
3	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/ Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Orang	150.000.000,-
4	Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 Orang	50.000.000,-

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026			
		Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sasaran/ Volume	Pagu Anggaran (Rp)
		tahun Kewenangan Kabupaten/ Kota			
5	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Orang	30.000.000,-
6	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/ Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Kecamatan Tenggarong, Kelurahan Melayu	10 Orang	40.000.000,-
7	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/ Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 Orang	50.000.000,-
8	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 Orang	50.000.000,-

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026			
		Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sasaran/ Volume	Pagu Anggaran (Rp)
		HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/ Kota			
9	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15 Orang	50.000.000,-
10	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 Orang	50.000.000,-
11	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/ Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	1 Dokumen	25.000.000,-
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					
Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar					
1	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/ Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25 Orang	850.000.000,-
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota					
1	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	11940 Orang	200.000.000,-

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026			
		Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sasaran/ Volume	Pagu Anggaran (Rp)
		yang Didata	Semua Kelurahan		
2	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1200 Usulan	100.000.000,-
3	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	500 Orang	2.504.000.000,-
4	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 Orang	250.000.000,-
PROGRAM PENANGANAN BENCANA					
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota					
1	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/ Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1500 Orang	500.000.000,-
2	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1500 Orang	150.000.000,-

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026			
		Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sasaran/ Volume	Pagu Anggaran (Rp)
		Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/ Kota			
3	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75 Orang	75.000.000,-
4	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/ Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	10 Unit	100.000.000,-
5	Pelayanan Dukungan Psikosial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikosial Kewenangan Kabupaten/ Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	150 ORang	75.000.000,-
Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota					
1	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Bangun, Loa Kulu, Muara Badak, Samboja	12 Desa/ Kelurahan	350.000.000,-
2	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	19 Orang	200.000.000,-

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026			
		Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sasaran/ Volume	Pagu Anggaran (Rp)
		Kabupaten/Kota			
Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota					
1	Peningkatan Kapasitas Relawan Taruna Siaga Bencana	Jumlah SDM Kapasitas Relawan Taruna Siaga Bencana Yang Mendapatkan Peningkatan Kapasitas	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan	19 Orang	100.000.000,-
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN					
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota					
1	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota	Tenggarong, Sanga-Sanga	2 Dokumen	3.150.000.000,-
2	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/ Kota	Tenggarong, Sanga-Sanga	91 Makam	350.000.000,-

BAB III

PENUTUP

Rencana Kerja Tahunan (RKT) PD merupakan dokumen perencanaan OPD tahunan yang berlandaskan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2026, proses penyusunan Rencana Kerja Tahunan PD Tahun 2026 mengacu pada prioritas pembangunan yang mendukung pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah Daerah.

a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian ;

1. Kurangnya kualitas sumber daya aparatur penyelenggara kesejahteraan sosial.
2. Optimalisasi Kegiatan Pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
3. Kecenderungan peningkatan jenis dan jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial.
4. Kurangnya sinergi stakeholders dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial

b. Kaidah – kaidah pelaksanaan ;

Berdasarkan panduan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi untuk kurun waktu satu tahun. Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan PD Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara kurun waktu 2026 sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM dan sumber pendanaannya serta komitmen seluruh aparatur Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara.

c. Rencana tindak lanjut ;

1. Peningkatan Kualitas Sumber daya aparatur penyelenggara Kesejahteraan Sosial.
2. Optimalisasi Pemutakhiran DTSEN.
3. Sinergitas antar stakeholders.

Rencana Kerja Tahunan (RKT) PD berisi perencanaan strategis yang bersifat operasional dalam menterjemahkan tugas dan fungsi perangkat daerah. Rencana Kerja Tahunan (RKT) PD nantinya menjadi acuan dan pedoman bagi unit kerja di Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara dalam menyusun rencana kerja tahunan yang ditandai dengan dituangkannya lokasi, sasaran dan indikator kinerja out put dan out come dari setiap kegiatan. Perencanaan strategis ini dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip efektif, efisien dan akuntabel, sehingga peningkatan kinerja individu, unit kerja dan organisasi dapat tercapai. Akhirnya semoga Dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKT) PD ini dapat dijadikan pedoman dan acuan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Akhirnya semoga Dokumen RKT PD tahun 2026 ini dapat memberikan arahan yang jelas tentang apa yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial. Dukungan dalam hal penganggaran sangat diharapkan sehingga capaian target yang telah ditentukan dapat terwujud.